

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak luas bagi kehidupan nelayan di Peureulak. Tatkala konflik masih berkecamuk, Masyarakat ditakutkan oleh akan adanya kontak senjata, *Sweeping*, pemungutan pajak secara liar, dan lainnya. Kehidupan normal agaknya tidak mudah dapat dinikmati oleh umumnya warga *gampong*, masyarakat merasakan kehidupan yang penuh ancaman dengan perang senjata.

Pada saat masyarakat dihimpit oleh dua kekuatan bersenjata yang saling berperang, masyarakat Aceh menjadi sangat menderita, dan pada saat itu tidak ada kelompok yang mendukung mereka. Masyarakat “dipaksa” untuk mendukung pemerintahan Indonesia di satu sisi, namun di sisi lain akan menjadi “terancam” oleh GAM, dan begitu sebaliknya. Pada masa itulah masyarakat menjadi sangat trauma dengan konflik, dan trauma inilah yang paling sulit disembuhkan. Seringkali masyarakat meragukan perubahan-perubahan politik yang terjadi: apakah akan membuat keadaan lebih baik, atau justru menjadi lebih buruk. Sehingga, masyarakat Aceh yang sebagian besar tinggal di pedesaan, di tepi hutan dan pantai, seringkali memilih menunggu akan adanya jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup mereka, daripada terlibat aktif dalam proses-proses politik yang sedang terjadi (Alfon Kimbal, 2016:154-155).

Pada saat berlangsung konflik, warga Aceh khususnya di Peureulak memiliki jam malam yaitu pukul 08:00 maksimal aktivitas, jika tidak diindahkan maka akan berurusan dengan petugas patroli dari aparat Tentara Nasional

Indonesia (TNI). Apabila dari setiap warga masih melakukan aktivitas diatas jam malam, maka warga peureulak khususnya bisa ditangkap dan dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), jika sudah tertangkap, uang tebusannya kala itu bisa mencapai nominal Rp 4 juta rupiah. Inilah mengapa beberapa anggota masyarakat yang sekalian saja bergabung dengan GAM dari pada setiap saat harus dicurigai oleh TNI. Pada masa operasi militer diberlakukan Indonesia, tentara jarang berspekulasi terlalu jauh dengan mengejar GAM hingga ke hutan-hutan, maka biasanya warga desa justru yang menjadi korban dari perlakuan buruk TNI ini (Ikrar Nusa Bakti, 2008:328).

Peran militer yang begitu dominan dalam politik perlahan kemudian dipangkas. Perubahan ini juga berdampak terhadap Aceh. Pada tanggal 7 Agustus 1998 menjadi tonggak baru bagi Aceh. Pada hari itu, Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto mengumumkan pencabutan status daerah operasi militer di Aceh, kasus-kasus pelanggaran HAM mulai diungkap kepada publik sebagai bagian dari kejahatan politik dan kemanusiaan dari pemerintahan Orde Baru. Sebuah landasan tuntutan baru muncul, yakni bagaimana keadilan terhadap korban dan pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer dilaksanakan. Tuntutan yang mengemuka diantaranya korban mendapatkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang layak, dan pelaku dibawa ke depan pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kejahatan HAM yang telah dilakukannya selama operasi militer dan pasca konflik. Namun, pengakuan pemerintah atas terjadinya pelanggaran berat pasca konflik operasi militer tidak ditindaklanjuti oleh proses hukum, bahkan tidak merubah tatanan politik di Aceh (Darmansyah Djumala, 2013:38).

Pemerintahan pasca Soeharto kembali melanjutkan watak dan perilaku rezim Orde Baru dalam wajah pemerintah lokal di Aceh, di mana korupsi, kolusi, nepotisme dan wajah yang militeristik masih tetap dipertahankan. Beberapa pelanggaran HAM skala berat justru berlangsung sesudah dicabutnya operasi militer dan digantikan oleh beberapa operasi militer lainnya seperti Operasi Sadar Wibawa, Operasi Sadar Rencong I, II, III, Operasi Meunasah, Operasi Pemulihan Keamanan, seperti Peristiwa Idi Cut (Aceh Timur), Tragedi Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah), Tragedi Simpang KKA, Peristiwa Gedung KNPI, dan lain-lain. Dalam Kasus peradilan koneksitas kasus Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah) dan Peristiwa Gedung KNPI keputusan pengadilan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena vonis yang dijatuhkan hakim sangat ringan dibandingkan dengan jumlah korban jiwa yang jatuh dalam dua peristiwa tersebut. Dari berbagai hasil laporan investigasi dapat dikalkulasi bahwa dari bulan Januari 1999 sampai September 2002 tercatat dalam (Daniel Hutagalung, 2014:1)

Masyarakat pedesaan di Aceh adalah yang paling merasakan penderitaan perang, khususnya di *gampong-gampong* yang dianggap basis GAM. Kekerasan yang di alami oleh warga desa muncul dari terjepit diantara dua kekuatan senjata yang tengah berperang. Penerapan darurat militer di Aceh secara logis memang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama di wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh Timur pesisir Peureulak yang dimasukkan “daerah hitam” atau basis GAM. Kecuali berujung pada jatuhnya korban meninggal, pelaksanaan darurat militer telah mengulang sejarah operasi militer di mana terhambatnya kebebasan masyarakat. Berbagai kegiatan berlangsung di tingkat *gampong-gampong* harus menghadapi perizinan yang ketat, entah itu pengajian di

mesjid aktifitas di *meunasah*, bahkan pengajian Al-Quran bagi anak-anak *gampong*. Semua aktifitas ini digerakkan oleh ulama-ulama Aceh yang bergerak di bidang pembinaan kehidupan beragama melalui pengajian atau ceramah agama di mesjid dan *meunasah*.

Bukan hanya itu, kegiatan ekonomi masyarakat pun juga harus meminta izin dari pihak aparat, seperti jika hendak pergi melaut atau bertambak, atau bertani. Jika lupa melapor maka konsekuensinya akan terkena rajam. Akibatnya masyarakat merasa trauma dan kehilangan kebebasannya. Masyarakat juga menderita ketakutan akibat penempatan pasukan di *gampong-gampong*, karena ada kalanya pasukan bersikap baik, namun lain waktu kedatangan pasukan lain yang suka bersikap kasar kepada masyarakat. Belum lagi, di bidang keamanan, masyarakat di bantu melakukan keamanan dalam menjaga keamanan melalui jaga malam, di mana dalam penerapannya masyarakat sering kali terkena tindak kekerasan (Ikrar Nusa Bakti, 2008: 328-329).

Berdasarkan uraian di atas mengenai dampak konflik politik terhadap mata pencaharian masyarakat Aceh yang berpengaruh terhadap perubahan pada komponen mata pencaharian masyarakat. Dirasa masih sangat terbatas dan perlu diteliti lebih lanjut. Mengenai mengapa penulis ingin melihat lebih lanjut aspek mata pencaharian hidup masyarakat alasannya adalah karena bagaimana pun aspek mata pencaharian hidup bisa menentukan tingkat kehidupan dibidang ekonomi mengalami kemerosotan yang sangat pesat ataukah sebaliknya dan bisa mempengaruhi bidang-bidang lain seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji persoalan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “*Kehidupan Nelayan di Peureulak pada masa Konflik Aceh (1998-2005)*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan dari “Kehidupan Nelayan di Peureulak Pada Masa Konflik Aceh (1998-2005)” ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi Peureulak pada masa konflik tahun 1998 – 2005?
- 2) Bagaimana kondisi kehidupan nelayan di Peureulak sepanjang tahun 1998-2005?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi Peureulak pada masa konflik tahun 1998-2005.
- 2) Untuk mengetahui kondisi kehidupan nelayan di Peureulak sepanjang tahun 1998-2005.

## **1.4. Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian tentang kehidupan nelayan di Peureulak pada masa konflik Aceh (1998-2005) ialah sebagai berikut:

### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambahkan teori atau pengetahuan sekaligus referensi tentang kondisi Peureulak pada masa konflik tahun 1998-2005 serta

kondisi kehidupan nelayan di Peureulak sepanjang tahun 1998-2005. Hal tersebut tentu menjadi acuan bagi pembaca dalam pengembangan tentang kehidupan nelayan dan konflik yang terjadi di Aceh.

## **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi penulis sendiri sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan sejarah serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui tentang “Kehidupan nelayan di Peureulak pada Masa Konflik Aceh (1998-2005)”.